

Menilik Potensi Ancaman Teror di Tahun 2023

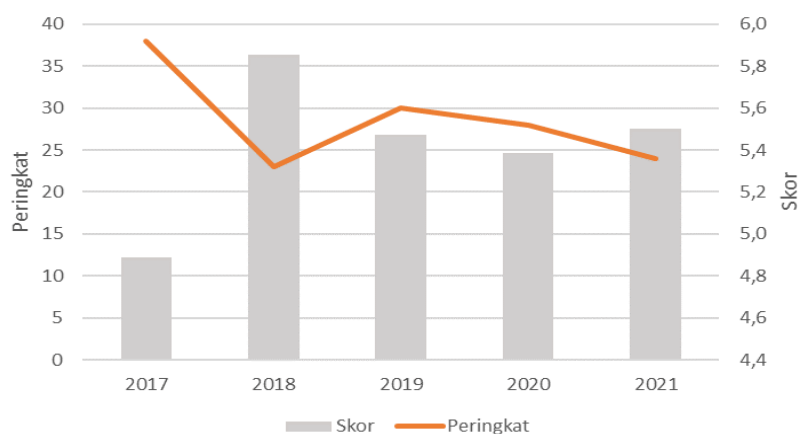
HIGHLIGHT

- Berdasarkan *Global Terrorism Index* tahun 2021, Indonesia memperoleh skor 5,5 poin berada di urutan ke-24 dari 163 negara yang terdampak terorisme.
- Terdapat ancaman peningkatan aksi-aksi teror di Indonesia yang menyertai kepulauan *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) ke Tanah Air.
- Terdapat ancaman teror *lone wolf* seiring dengan masifnya penyebaran ideologi radikalisme dan terorisme di dunia maya.
- Pada awal tahun 2022, BNPT memetakan prediksi ancaman dari aktivitas terorisme mendatang yang menargetkan simbol dan institusi negara, seperti aparat penegak hukum yang di antaranya adalah Polri.
- Pagu anggaran BNPT tahun 2023 menurun sebesar 5% dibandingkan pagu anggaran tahun sebelumnya.

Tindakan terorisme kembali terjadi di Indonesia pada penghujung tahun 2022. Aksi terorisme berupa bom bunuh diri oleh seorang mantan narapidana kasus terorisme yang terjadi di kota Bandung, tepatnya di Polsek Astana Anyar. Aksi-aksi seperti itu perlu diwaspadai sebagai bentuk ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional sekaligus menandakan bahwa radikalisme dan intoleransi masih beredar di tengah masyarakat Indonesia.

Berdasarkan *Global Terrorism Index* tahun 2021, Indonesia memperoleh skor 5,5 poin berada di urutan ke-24 dari 163 negara yang terdampak terorisme. Dengan skor tersebut, Indonesia masuk ke dalam kategori berdampak sedang. Adapun skor tersebut berdasarkan pada dampak secara langsung maupun tidak langsung dari aktivitas terorisme. Dampak tersebut antara lain jumlah insiden teror serta banyaknya korban jiwa maupun cedera dalam periode satu tahun. Terjadi peningkatan peringkat Indonesia dari sebelumnya berada di posisi ke-28 pada tahun 2020 dan posisi ke-30 pada tahun 2019.

Gambar 1. *Global Terrorism Index* Indonesia Tahun 2017-2021



Sumber: *Global Terrorism Index* 2017-2021, diolah

Potensi Ancaman Teror di Tahun 2023

Terdapat ancaman peningkatan aksi-aksi teror di Indonesia yang menyertai kepulauan *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) ke Tanah Air, baik secara legal maupun ilegal. Secara prosedur, kepulauan FTF ke Indonesia harus melalui proses deradikalisasi yang dilakukan di Rumah Perlindungan dan Trauma Center untuk menurunkan tingkat radikalisme dan memulihkan keberfungsian sosial sebelum mereka dapat kembali ke daerah asal masing-masing. Namun, hal ini tidak berlaku bagi para FTF yang pulang ke Indonesia secara ilegal. Lebih lanjut, kendati proses deradikalisasi telah dilakukan, tetap terdapat ancaman bahwa *returnees* dan deportan dapat bergabung dengan

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal
DPR RI

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Penulis:

Leo Iskandar · Ratna Christianingrum

kelompok-kelompok teror yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan karena mereka memiliki kemampuan yang dapat mendukung perkembangan jaringan terorisme di Indonesia.

Gambar 2. Data *Foreign Terrorist Fighters* Indonesia di Wilayah Konflik

Status	Suriah & Irak	Filipina	Afganistan
Masih di zona konflik	1.251	13	10
Meninggal dunia	127	11	2
Deportasi	555	7	11
Returnees	194	4	0
Total	2.127	35	23

Sumber: BNPT 2022, diolah

Tahun 2023 juga tidak lepas dari ancaman teror *lone wolf*, sebutan bagi pelaku teror yang tidak terafiliasi dengan organisasi terorisme. Aksi teror *lone wolf* dilakukan sendiri oleh individu atau kerja sama beberapa individu yang dipicu dari provokasi penyebaran ideologi radikalisme dan terorisme. Fenomena ini berpotensi menjadi ancaman di masa depan seiring dengan masifnya penyebaran paham semacam itu di dunia maya. Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius pada tahun 2019 menyebut terjadi perkembangan metode penyebaran paham radikalisme dan terorisme hingga perekrutan terorisme dari yang sebelumnya dilakukan secara konvensional yang bersifat tertutup dan terbatas menjadi komunikasi massa secara digital yang bersifat terbuka dengan memanfaatkan teknologi internet, antara lain melalui media sosial dan *website*. Selama tahun 2018, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan pemblokiran konten yang memuat terorisme dan radikalisme hingga berjumlah 10.499 konten, dimana sebanyak 7.160 konten atau 68,2% berasal dari media sosial Facebook dan Instagram.

Sehubungan dengan prediksi penetapan target serangan terorisme, pada awal tahun 2022 BNPT telah memetakan prediksi ancaman dari aktivitas terorisme mendatang. Adapun simbol dan institusi negara, seperti aparat penegak hukum yang di antaranya adalah Polri, diperkirakan tetap akan menjadi target para pelaku teror di Indonesia.

Rencana Kerja BNPT di Tahun 2023

BNPT selaku lembaga yang memimpin penanggulangan terorisme di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memiliki program kerja pada tahun 2023 yang berfokus kepada transformasi wawasan kebangsaan. Sasaran program kerja tersebut adalah penguatan paradigma nasional, penguatan empat konsensus nasional bangsa dan penguatan wawasan nusantara. Berbagai upaya penguatan tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas keamanan menjelang tahun politik 2024.

Pagu anggaran BNPT tahun 2023 menurun sebesar 5% dari pagu anggaran BNPT tahun sebelumnya sehingga menjadi sebesar Rp431,2 miliar. Pagu anggaran untuk Program Penanggulangan Terorisme di tahun 2023 menurun sebesar 5,8% dibandingkan pagu anggaran program yang sama tahun sebelumnya sehingga menjadi Rp256,3 miliar. Secara lebih rinci, alokasi anggaran untuk Program Penanggulangan Terorisme sebagai berikut:

1. Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan dengan pagu anggaran Rp149,1 miliar
2. Penanggulangan Terorisme Bidang Penindakan dengan pagu anggaran Rp90,4 miliar
3. Penanggulangan Terorisme Bidang Kerja Sama Internasional dengan pagu anggaran Rp16,9 miliar

Alokasi anggaran Program Penanggulangan Terorisme BNPT tahun 2023 difokuskan kepada bidang pencegahan, dengan fokus utama pada Kegiatan Kontra Radikalisisasi dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dengan pagu anggaran masing-masing sebesar Rp50,6 miliar dan Rp44,7 miliar atau 37,2% dari total pagu anggaran Program Penanggulangan Terorisme.